

**HUKUM MENGGADAIKAN HARTA ANAK YATIM SEBAGAI
JAMINAN UTANG OLEH PIHAK WALI (RAHIN) MENURUT IMAM
SYAFI'I
(STUDI KASUS DI DESA JABI-JABI KECAMATAN
SULTAN DAULAT KOTA SUBULUSSALAM-
ACEH)**

SKRIPSI

Oleh :

**SUHERMAN
NIM: 24.14.3.004**



**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
M E D A N
2019 M /1440 H**

IKHTISAR

Skripsi ini berjudul: **Hukum Menggadaikan Harta Anak Yatim Sebagai Jaminan Utang Oleh Pihak Wali Menurut Imam Syafi'i (Studi Kasus Di Desa Jabi-Jabi Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam-Aceh)**. Permasalahan dalam penelitian ini dimana seorang wali menggadaikan harta milik anak yatim, harta yang digadaikan oleh wali tersebut bukan untuk memenuhi kebutuhan anak yatim akan tetapi untuk kebutuhan pribadi wali sendiri. Adapun penelitian ini dilakukan di Desa Jabi-Jabi Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam-Aceh yang melakukan transaksi menggadaikan harta anak yatim sebagai jaminan utang oleh pihak wali, apakah sudah sesuai yang telah diatur oleh syari'at Islam khususnya menurut Imam Syafi'i. Rumusan masalah dalam penelitian ini: apa hukum menggadaikan harta anak yatim sebagai jaminan utang wali, bagaimana pelaksanaan gadai harta anak yatim di Desa Jabi-Jabi Kecamatan Sultan Daulat sebagai jaminan utang wali dan bagaimana pelaksanaan gadai oleh wali anak yatim di Desa Jabi-Jabi ditinjau menurut Imam Syafi'i. Tipe penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis empiris. Karena tipe penelitian yuridis empiris maka metode penelitian ini adalah metode lapangan (*field research*) dengan penelitian pustaka (*library research*) teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara secara terstruktur. Kemudian setelah diperoleh data-data maka akan dilakukan analisis deskriptif (*analitical description*). Penelitian yang dilakukan peneliti diketahui bahwa: pelaksanaan menggadaikan harta anak yatim untuk dijadikan sebagai jaminan utang oleh wali yang terjadi di Desa Jabi-Jabi tidak memenuhi rukun dan syarat-syarat gadai menurut pendapat Imam Syafi'i dan transaksi gadai tersebut dikatakan tidak sah. Terkait dengan gadai, Imam Syafi'i memberikan pendapat mengenai rukun dan syarat-syarat gadai. Dengan alasan menurut Imam Syafi'i dalam Kitab *Al-Umm* tidak boleh menggadaikan melainkan pada sesuatu yang lebih terhadap dirinya dan tidak boleh menggadaikan harta milik anak yatim untuk dijadikan jaminan utang oleh pihak wali yang bukan untuk kepentingan dan keperluan anak yatim tersebut, terkecuali transaksi gadai yang dilakukan oleh pihak wali merupakan atas nama dan keperluan anak yatim yang diampunya tersebut.

Kata Kunci: Hukum, gadai, harta, anak yatim, Imam Syafi'i.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kepada Allah Swt atas segala limpahan anugrah dan rahmat yang diberikan-Nya sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan sebagaimana yang diharapkan. Tidak lupa shalawat dan salam penulis hadiahkan kepada Rasulullah Muhammad Saw yang merupakan contoh tauladan dalam kehidupan manusia menuju jalan yang diridhai Allah Swt.

Skripsi ini berjudul Hukum Menggadaikan Harta Anak Yatim Sebagai Jaminan Utang Oleh Pihak Wali (Rahin) Menurut Imam Syafi'i (Studi Kasus di Desa Jabi-Jabi Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam-Aceh) dan diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Serjana Hukum (SH) Jurusan Hukum Ekonomi Islam (Muamalah) di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat diselesaikan berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis berterima kasih kepada semua pihak yang secara langsung dan tidak langsung memberikan kontribusi dalam menyelesaikan skripsi ini. Secara

husus dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar- sebesarnnya kepada:

1. Bapak Prof Dr. H. Saidurrahman, M.Ag selaku Rektor UIN Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. Zulham, M. Hum selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Sumatera Utara.
3. Dra. Armauli Rangkuti, MA sebagai dosen pembimbing I yang telah memberikan banyak arahan dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Cahaya Permata, S. HI. MH, sebagai dosen pembimbing II yang telah memberikan banyak arahan dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Fatimah Zahara, MA sebagai dosen Ketua Jurusan Program Studi Hukum Ekonomi Islam (Muamalah) dan juga sebagai Pembimbing Akademik yang telah banyak membimbing dan memberikan arahan selama di bangku perkuliahan.
6. Ibu Tetty Marlina SH. MKN, sebagai dosen Sekretaris Jurusan (sekjur) Program Studi Hukum Ekonomi Islam (Muamalah) yang

telah banyak membimbing dan memberikan arahan selama di bangku perkuliahan..

7. Bapak dan Ibu dosen yang telah mendidik penulis selama menjalani pendidikan di bangku perkuliahan di Fakultas Syariah UIN Sumatera Utara.
8. Yang paling istimewa kepada kedua orang tua tercinta yaitu ayahanda (Raja Brutu) dan Ibunda (Ralijah). Karena berkat beliaulah skripsi ini dapat terselesaikan berkat do'a dan kasih sayang serta pengorbanannyalah ananda dapat menyelesaikan studi sampai ke bangku sarjana. Semoga Allah memberikan balasan yang tak terhingga dengan surga yang mulia. Amin.
9. Abangda Mulyadi Brutu, Rimin Brutu, dan adinda Pajri Brutu, Agusti Brutu dan Kakak ananda Derang, Darmawati, Masdar, Rabilah yang senantiasa memberikan bantuan, dukungan semangat, motivasi dan do'a sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini pada waktunya.

10. Teman- teman seperjuangan Muamalah stambuk 2014-2015, yang senantiasa memberikan semangat serta dorongan dalam penyusunan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu- persatu.

11. Terima kasih juga kepada adinda Sahriani yang selalu memberikan semangat, dukungan dan do'a, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

12. Terima kasih Sahabat, Ali aman, Nurdin, Muhammad Irham Maha dan Muhammad Firdaus dan Jalil. yang senantiasa memberikan bantuan, dukungan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini pada waktunya.

13. Terima kasih banyak kepada teman-teman satu asrama yang sudah memberikan dukungan dan semangat sehingga skripsi ini dapat selesai.

14. Terima kasih saya ucapkan kepada semua teman-teman yang telah mengucapkan.

Penulis telah berupaya dengan segala upaya yang penulis lakukan dalam penyelesaian skripsi ini. Namun penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan kelemahan baik dari segi isi maupun tata bahasa.

Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Kiranya isi skripsi bermanfaat dalam memperkaya khazanah ilmu pengetahuan. Amin.

Medan, 13 Januari 2019

SUHERMAN
NIM. 24.14.30.04

DAFTAR ISI

Menyetujui.....	i
IKHTISAR.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Kajian Terdahulu.....	9
F. Kerangka Teoritis	11
G. Hipotesis	12
H. Metode Penelitian	13
I. Sistematis Pembahasan.....	18
BAB II: PEMBAHASAN UMUM TENTANG GADAI (<i>RAHN</i>)	
A. Pengertian Gadai	20
B. Landasan Hukum Gadai.....	21
C. Rukun dan Syarat <i>Rahn</i> (gadai).....	23
D. Berakhirnya Akad <i>Rahn</i> (gadai)	29

BAB III : GAMBARAN UMUM DESA JABI-JABI KECAMATAN

SULTAN DAULAT KOTA SUBULUSSALAM-ACEH

- A. Letak Geografis 31
- B. Kondisi demografis..... 32

BAB IV : ANALISIS TERHADAP PRAKTEK RAHN DI DESA JABI-JABI DITINJAU DARI PERSPEKTIF IMAM SYAFI'I

- A. Hukum Menggadaikan Harta Anak Yatim Sebagai Jaminan
Utang Ditinjau Persepektif Imam Syafi'i 42
- B. Pelaksanaan gadai terkait harta anak yatim di Desa Jabi-Jabi
Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam- Aceh 45
- C. Pelaksanaan gadai oleh wali anak yatim di Desa Jabi-jabi
ditinjau dari perspektif Imam Syafi'i 61

BAB V : PENUTUP

- A. Kesimpulan 66
- B. Saran-saran 67

DAFTAR PUSTAKA69

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial, yang senantiasa bergantung dan terikat serta saling membutuhkan satu dengan lainnya. Allah SWT telah mengatur manusia untuk saling tolong-menolong demi tercapainya sebuah cita-cita yang diharapkan bersama.

Mengenai hubungan individu dengan individu lainnya, yakni masalah hak dan kewajiban, harta, jual-beli, kerja sama dalam berbagai bidang, pinjam meminjam, sewa menyewa, penggunaan jasa dan kegiatan-kegiatan lainnya yang sangat diperlukan manusia dalam kehidupan sehari-hari, telah diatur dalam fiqh muamalah.¹

Masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, ada yang memerlukan dana mendesak, seperti untuk pengobatan, biaya hidup dan masih banyak lagi keperluan- keperluan yang tidak bisa dihindari. Orang tersebut dapat meminjam uang dengan suatu jaminan barang atas utangnya sebagai

¹M Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2003, h. 1.

pegangan sekiranya uang pinjaman itu tidak dapat dikembalikan, inilah yang dapat disebut dengan akad *ar-rahn*.²

Ar-rahn (gadai) adalah menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan Syari'at sebagai jaminan hutang, sementara si penerima barang gadai dimungkinkan bisa mengambil barang itu sebagai ganti utang atau mengambil sebagian manfaatnya, pemilik barang yang berhutang disebut *rahn* (penggadai), pemberi utang yang menahan barang dibawah kekuasaannya disebut *murtahin* (penerima gadai), dan barang yang digadaikan disebut *rahn* (barang gadai).³

Menurut Ibnu Munzir berkata: dari kalangan ulama sepakat bahwa orang yang menjaminkan sesuatu dengan harta, lalu melunasi sebagian utangnya dan ingin mengambil kembali sebagian harta jaminan, maka itu tidak berhak atas itu sebelum ia melunasi sebagian yang lain dari utangnya atau si *murtahin* (penerima gadai) membebaskannya.⁴

²M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah Zakat, Pajar, Asuransi, Dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo persada, 2000), h. 82.

³Mardani, *Hukum Perikatan Syari'ah Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), h. 793.

⁴Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta Timur: Amzah, 2010), h. 95

Para ulama fiqih juga telah sepakat bahwa gadai hukumnya boleh (jaiz), mereka tidak pernah mempertentangkan kebolehan gadai. Adapun dasar hukum tentang kebolehan gadai ini dapat dilihat dalam ketentuan Al-Qur'an surah Al- Baqarah ayat 283:

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَتَى بَعْضُكُمْ بَعْضًا

فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا

فَإِنَّهُ رَءِءِثٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

Artinya: Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhan-nya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah seorang yang berdosa hatinya; dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.⁵ (QS. Al- Baqarah [2]: 283).

⁵ Departemen Agama RI, *Al- Qur'an Dan Terjemahannya*, (Surabaya: Dana Karya, 2004), h .50.

Sedangkan dalam hadis. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Aisyah r.a, bahwa Rasulullah SAW bersabda:

عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما إلى أجل ورهنه
درعا من حد يد (رواه البخاري ومسلم).

Artinya: *Dari Aisyah r.a sesungguhnya Nabi S.a.w. pernah membeli makanan dari orang yahudi dan beliau menggadaikan kepadanya baju besi beliau*”.⁶ (HR. Bukhari dan Muslim).

Hadis tersebut diatas menjelaskan bahwa membolehkan seseorang untuk menggadaikan sesuatu atau barang miliknya sendiri untuk dijadikan jaminan terhadap utang sebagaimana yang didahulukan Nabi Muhammad SAW. Orang yang melakukan perjanjian gadai, harus menyerahkan barang yang digadaikan kepada penerima gadai, jika barang yang menjadi objek gadai itu tidak diserahkan maka hukum gadai tersebut menjadi tidak sah.

Barang yang digadaikan itu merupakan miliknya sendiri dan untuk kepentingan dari pihak yang menggadaikan (*Rahin*). Penerima gadai harus menjaga barang gadaian, karena barang gadai merupakan amanat yang

⁶ Muhammad asy-Syaukani, *Nail al-Autar*, Jaz V (Beirut: Dar al-Fikr,t.th), h. 233.

harus dijaga oleh penerima gadai. Adapun syarat dari *rahin* (orang yang menggadaikan) adalah Orang yang menggadaikan dan menerima gadai itu akil baligh, dan tidak dilarang mempergunakan hartanya dan dilakukannya dengan kemauannya. Maka tidaklah diperbolehkan wali menggadaikan barang milik anak yatim dan harta benda milik orang gila dan sebagainya. Adapun syarat sah gadai didalam kitab *Al-umm* yang dikemukakan Imam Syafi'i adalah :

- a. Harta gadai yang sah adalah harta gadai yang dimiliki penuh oleh penggadai,
- b. Harta gadai itu tidak memikul tanggungan atas sesuatu kejahatan dimana korban kejahatan lebih berhak terhadapnya dari pada pemiliknya hingga hak korban itu terpenuhi,
- c. Harta gadai itu tidak terkait dengan hak orang lain.⁷

⁷ Imam Syafi'i, *Ringkasan Kitab Al-umm jilid 2*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013) h. 153.

Adapun pendapat Imam Syafi'i mengenai syarat orang yang menggadaikan harta gadaian itu adalah:

قال الشافعي: لا يجوز ارتحانه إلا فيما يفضل لنفسه، أو يتيمة، أو ابنه، من أبي ولد، وولي يتيمة، ومكاتب، وعبد مأذون له، فلا يجوز أن يرهن شيئاً، لأن الرهن أمانة، ولدين لازم، فالرهن بكل حال نقص عليهم.⁸

Artinya : Tidak boleh menggadaikannya melainkan pada sesuatu yang lebih terhadap dirinya, atau anak yatimnya, atau anaknya sendiri, dari pada bapak si anak, dan wali anak yatim, dan budak mukatab, dan hamba yang diizinkan baginya, maka ia tidak boleh menggadaikan sesuatu apapun, karena gadai merupakan amanah, sedangkan utang itu merupakan kelaziman, maka gadai setiap keadaan itu kurangnya atas mereka.

Berdasarkan beberapa penjelasan diatas. Bahwa orang yang menggadaikan harta anak yatim untuk keperluan pribadi tidak di bolehkan, karena barang yang di jadikan barang gadai itu harus untuk keperluan atau

⁸Abu Abdullah Muhammad bin Idris, Asy-Syafi'i, *Kitab Al-umm*, jilid III (Beurit: Dal Al- Kutub Al-Ilmiyah), h. 177.

kepentingan anak yatim bukan keperluan wali, dalam hal ini akan merugikan satu pihak yaitu si anak tersebut.

Realitanya, pelaksanaan transaksi gadai yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Jabi-jabi Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam-Aceh bertolak belakang dengan pendapat Imam Syafi'i. Masyarakat yang disana menggadaikan harta atau barang yang bukan miliknya sendiri, dalam hal ini harta atau barang yang di gadaikan merupakan harta anak yatim yang dijadikan sebagai objek gadai oleh walinya, untuk keperluan dan kepentingan pribadi.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis ingin meneliti lebih lanjut dalam sebuah karya ilmiah dengan judul penelitian:

HUKUM MENGGADAIKAN HARTA ANAK YATIM SEBAGAI JAMINAN UTANG OLEH PIHAK WALI (*RAHIN*) MENURUT IMAM SYAFI'I (Studi Kasus di Desa Jabi-jabi Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam- Aceh)".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalahnya adalah:

1. Apa hukum menggadaikan harta anak yatim sebagai jaminan hutang wali (*rahin*) ditinjau dari perspektif Imam Syafi'i ?
2. Bagaimanakah pelaksanaan gadai harta anak yatim di desa Jabi-jabi Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam- Aceh yang di jadikan sebagai jaminan utang oleh pihak wali (*rahin*) ?
3. Bagaimanakah pelaksanaan gadai oleh wali anak yatim di Desa Jabi-jabi ditinjau dari perspektif Iman Syafi'i ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui hukum menggadaikan harta anak yatim sebagai jaminan utang oleh pihak wali (*rahin*) ditinjau dari perspektif Imam Syafi'i.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan gadai harta anak yatim di Desa Jabi-jabi Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam- Aceh yang di jadikan sebagai jaminan utang oleh pihak wali (*rahin*).
3. Untuk mengetahui pelaksanaan gadai harta anak yatim di Desa Jabi-jabi ditinjau dari perspektif Imam Syafi'i.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan menggadaikan harta anak yatim.
2. Sebagai informasi dan bahan penelitian bagi peneliti selanjutnya khususnya mahasiswa fakultas syari'ah.
3. Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat khususnya Desa Jabi-jabi tentang hukum menggadikan harta anak yatim sebagai jaminan utang oleh pihak wali (rahin).

E. Kajian Terdahulu

Masalah Gadai adalah masalah yang cukup banyak di bahas dan diteliti diantaranya:

Skripsi Salihati Tentang. "Hukum Akad *Rahn* (Gadai) Dengan Jaminan Piutang Menurut Madzhab Syafi'i. Dalam skripsinya bahwa hukum akad *Rahn* (gadai) dengan Jaminan Piutang tidak sesuai syarat jaminan *rahn* (gadai). Pada praktek atau kebiasaan adat di Desa Serang Jaya Kecamatan Pemantang Jaya tersebut, bahwa masyarakat melakkan akad *rahn* (gadai) dengan jaminan berupa utang.

Skripsi Ary Ma'arif. Tentang Hukum Menjadikan Barang Kredit Sebagai Jaminan ditinjau menurut Fikih Syafi'i. dalam skripsinya ia membahas bahwa praktek gadai yang dilakukan masyarakat Bandar

Khalifah tidak sesuai dengan syarat dan rukun, dan objek gadai yang dilakukan sepeda motor yang masih kredit atau belum lunas.

Sejauh ini berdasarkan hasil pencarian dan penelusuran yang dilakukan oleh penulis belum ada yang membahas tentang hukum menggadaikan harta anak yatim sebagai jaminan utang oleh pihak wali (*rahn*) menurut Imam Syafi'i yang studi lapangannya di Desa Jabi-jabi, Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam-Aceh. Bahwa yang menjadi perbedaan skripsi ini, praktek gadai yang dilakukan Masyarakat Desa Jabi-jabi merupakan harta atau barang yang dijadikan objek gadai oleh wali ialah merupakan harta milik anak yatim yang digadaikan oleh walinya untuk dijadikan sebagai jaminan utang pribadi.

F. Kerangka Teoritis

Rahn merupakan kebutuhan salah satu untuk bermuamalah dengan secara tunai, manusia hampir setiap hari tidak terlepas dari melakukan gadai dengan orang lain. Dengan demikian, gadai yang dilakukan harus sempurna rukun dan syarat gadai (*rahn*) tersebut.

Ulama fiqih mendefenisikan gadai adalah utang dan disertai dengan jaminan.⁹ Sesuatu yang dijadikan sebagai jaminan tersebut *marhun*, pihak yang menyerahkan jaminan disebut *rahin*, sedangkan pihak yang menerima jaminan disebut *murtahin*.

Anak kecil dan orang gila dilarang untuk melakukan tindakan hukum, maka dari itu anak tersebut haruslah mempunyai wali untuk mengasuh dan menjaganya, serta mengurus dan merawatnya sampai dewasa, wali juga dibebankan selalu amanah untuk mengurus wasiat, dan wali disyaratkan harus baliqh, mengerti dan seagama, bahkan wali itu harus disyaratkan berlaku adil.

Adapun dasar hukum tentang larangan memakan harta anak yatim dapat dilihat dalam ketentuan Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 2:

وَأَتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَيْرَ بِالْطَّيِّبِ ۖ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ

أَمْوَالِكُمْ ۚ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا ﴿٢﴾

Artinya: Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah dewasa) harta mereka, janganlah kamu menukar yang baik dengan yang buruk,

⁹ Ghufuran A Mas'adi, *Fiqih Muamalah Kontektual* (Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2002), h. 175-176.

dan janganlah kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sungguh (tindakan menukar dan memakan) itu adalah dosa besar.¹⁰ (QS. An-Nisa [4]: 2).

Mengenai menggadaikan harta anak yatim sebagai jaminan utang, pada prinsipnya seluruh fuqaha' sepakat bahwasanya tidak boleh menggadaikan harta yang dibawah perwalian sebagai jaminan utang terkecuali gadai itu merupakan kepentingan atau keperluan atas hak si anak yatim tersebut.¹¹

G. Hipotesis

Praktek menggadaikan harta anak yatim sebagai jaminan utang oleh pihak wali (*rahin*) menurut Imam Syafi'i di Desa Jabi-Jabi Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam-Aceh dinyatakan tidak sah. Karena menurut pendapat Imam Syafi'i tidak boleh menggadaikannya melainkan sesuatu yang lebih terhadap dirinya, atau anak yatimnya, atau anaknya sendiri, dari bapak sianak dan wali anak yatim maka ia tidak boleh menggadaikan sesuatu

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Dana Karya, 2004), h. 77.

¹¹ Syihabuddin ar-Ramli, *Nihayah al-Muthaj ila Syarh al-Minhaj*, (Riyat: Dar Alam al-Kutub, 1997), h. 283.

apapun karena gadai merupakan amanah sedangkan utang merupakan kelaziman.

H. Metode Penelitian

Untuk memudahkan pemahaman dalam melihat dan menggambarkan cara kerja penelitian skripsi ini, penulis mengambil langkah-langkah dalam metode penelitian sebagai berikut:

1. Tipe Penelitian

Tipe yang dilakukan adalah penelitian yuridis empiris dengan pertimbangan titik tolak analisis terhadap kenyataan di masyarakat terkait pelaksanaan gadai. Karena tipe penelitian ini adalah yuridis empiris maka metode yang dilakukan adalah metode penelitian lapangan (*field research*) yang digabungkan dengan metode penelitian pustaka (*library research*) yang digunakan untuk menggali literatur-literatur, yang terkait dengan hukum menggadaikan harta anak yatim sebagai jaminan utang.

2. Pendekatan Masalah

Sehubungan dengan tipe penelitian yang digunakan yakni yuridis empiris maka pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan sosiologis (*sociological approach*) yang digunakan untuk memahami gejala sosial yang

terjadi dimasyarakat. Dalam hal ini masalah yang terjadi dimasyarakat adalah menggadaikan harta anak yatim sebagai jaminan utang oleh pihak wali (*Rahin*). Dalam hal ini, wali dari anak yatim tersebut menggadaikan harta atau barang yang bukan hak milik sepenuhnya dari hasil gadai tersebut dijadikan untuk keperluan ataupun kepentingan pribadi bukan untuk kepentingan anak yatim. Transaksi gadai tersebut dilakukan masyarakat di Desa Jabi-Jabi Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam-Aceh. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan konsep (*conceptual approach*) yang digunakan untuk memahami konsep-konsep tentang menggadaikan harta anak yatim sebagai jaminan utang oleh pihak wali (*Rahin*) Menurut Imam Syafi'i.

3. Sumber data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan tiga sumber data yaitu data primer, data sekunder dan data tersier:

- a. Data primer yaitu data pokok yang penulis dapatkan dari responden dilokasi penelitian yaitu Desa Jabi-jabi Kecamatan Sultan Daulat. Data tersebut akan diperoleh dengan metode:

1. Wawancara dengan pihak yang melakukan gadai.

2. Buku-buku kitab Imam Syafi'i yaitu kitab Al-Umm, dan buku kitab-kitab yang bermazhab Syafi'i.
- b. Data sekunder yaitu data yang mendukung data primer, data sekunder berasal dari tokoh agama dan tokoh masyarakat, literatur yang berhubungan dengan pembahasan gadai, yaitu:
- 1) Fiqh muamalah yang ditulis oleh Ahmad Wardi Muslich.
 - 2) Pengantar Fiqh muamalah yang ditulis oleh Hasbi ash shiqi
 - 3) Fiqih Islam wa adillatuhu yang ditulis oleh Wabah az- Zuhaili.
 - 4) Fatwa DSN/MUI tentang Gadai, dan lain-lain.
- c. Data tersier yaitu data yang mendukung diperoleh dari Artikel, jurnal, dan bacaan- bacaan lain yang sesuai dengan penelitian ini, untuk dijadikan sebagai perbandingan untuk menemukan hasil penelitian melalui tahapan-tahapan tertentu yang digunakan dalam penelitian ini.
4. Teknik Pengumpulan Data

Tehnik pengumpulan data merupakan langkah-langkah paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan

data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka penelitian tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.¹²

Pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan metode wawancara: yaitu metode yang berupa Tanya jawab secara langsung dengan daftar pertanyaan yang telah direncanakan. Baik dengan wawancara terstruktur dan tidak terstruktur yang dilakukan informan yang dipilih sesuai dengan kebutuhan yang memenuhi standart. Maksud dari wawancara terstruktur adalah yang yang dilakukan jika peneliti mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan didapat, peneliti telah menyiapkan data berupa instrument pertanyaan yang akan diajukan dan alternatif jawabannya juga telah diketahui

Wawancara terstruktur ini setiap informan memperoleh pertanyaan sama, mulai dari urutan pertanyaan kata-katanya dan cara penyajiannya, serta mengumpulkan datanya. Sementara wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang dilakukan dengan bebas untuk menggali informasi yang sesuai dengan kebutuhan oleh peneliti.

5. Pengolahan dan Analisis Data

¹² Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), h. 224.

Setelah diperoleh data melalui alat pengumpulan data di atas, maka akan dilakukan analisis deskriptif (*analistical description*) terhadap data-data tersebut, yaitu menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat lebih dipahami dan disimpulkan, karena penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan sistematis dan akurat fakta dan karakteristik mengenai bidang tertentu. Dengan demikian data-data tersebut disimpulkan secara umum. Analisis peneliti adalah dengan melihat langsung fakta yang ada di lapangan dengan hukum menggadaikan harta anak yatim sebagai jaminan utang oleh pihak wali menurut Persefektif Imam Syafi'i.

6. Lokasi penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang dilakukan di Desa Jabi jabi Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam-Aceh.

7. Pedoman Penulisan

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan buku metode penelitian Hukum Islam dan Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Tahun 2018.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih mempermudah para pembaca memahami masalah-masalah yang akan dibahas dalam pembahasan skripsi ini maka penulis menjadikan pembahasan yang dibagi kepada lima bab dan setiap bab terdiri dari beberapa sub bab, yaitu sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan yang terdiri dari: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Terdahulu, Kerangka Teori, Hipotesis, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

BAB II: Pada bab ini penulis membahas: Pengertian gadai (*Rahn*), Landasan hukum gadai, rukun dan syarat gadai, berakhir akad gadai.

BAB III: Membahas gambaran umum, letak geografi, Kondisi Demografis.

BAB IV: Penulis membahas tentang. Hukum menggadaikan harta anak yatim sebagai jaminan utang ditinjau perspektif Imam Syafi'i. pelaksanaan gadai harta anak yatim di Desa Jabi-jabi Kecamatan Sultan Dulat Kota Subulussalam yang dijadikan sebagai jaminan utang oleh pihak wali (rahin). Pelaksanaan Gadai oleh wali anak yatim di Desa Jabi-jabi ditinjau dari perspektif Imam Syafi'i.

BAB V: Penutup yang berisi tentang kesimpulan, saran-saran

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG *RAHN* (GADAI)

A. Pengertian Gadai

Menurut bahasa, gadai (*ar-rahn*) bermakna “tetap dan kekal”, sebagian ulama lughat memberikan arti bahwa *rahn* berarti “tertahan”.

Sedangkan *rahn* menurut istilah syara' yang dikemukakan oleh Imam Syafi'i ialah :

جعل عين وثيقة بدين يستوفي منها عند تعذر وفاءه.¹

Menjadikan suatu barang sebagai jaminan utang, yang dapat dijadikan pembayaran utang apa bila orang yang berhutang tidak bisa membayar utangnya itu.

Sedangkan pengertian gadai menurut ulama Syafi'iyah yaitu:

“*Rahn* (gadai) yaitu menjadikan barang yang boleh dijual sebagai kepercayaan hutang dimana akan dibayar dari padanya, jika hutang tersebut tidak dilunasi maka barang tersebut akan dijual”.²

¹Abu Abdullah Muhammad Bin Idris Asy-Syafi'i, *Al-umm*, Jilid III, (Beurit: Dal Al-Kutub Al-Ilmiyah), h. 166.

² Aliy As'ad, *Terjemahan Kitab Fathul Mu'in*, jilid 2 (Yogyakarta: Menara Kudus 1979), h.215.

Terlepas dari depenisi di atas, maka secara sederhana *rahn* merupakan sebuah akad utang piutang yang disertai dengan jaminan atau aguanan.

B. Landasan Hukum Gadai

Gadai adalah salah satu aktivitas muamalah yang diperbolehkan syari'at Islam, Sebagaimana pandangan ulama fiqh tentang kebolehan akad gadai didasarkan pada keterangan Al-Qur'an, As-sunnah, Qiyas dan ijma' sebagai berikut:

1. Al-Qur'an

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَنْ مَّقْبُضَةً فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي دَالَذَىٰ أَوْثَمِينَ أَمَّتَهُ

وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ³

Artinya: Jika (hendak bermuamalah secara tidak tunai)engkau dalam perjalanan sedang engkau tidak menemukan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jamina. Jika kamu sekalian saling mempercayai, maka hendaklah orang yang dipercayai itu selalu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhan-Nya; dan jangan kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang

³Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*,(Surabaya: Dana Karya, 2004), h.50.

berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. [QS. Al- Baqarah [2] :283].

2. As-sunnah

عن عائشة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما ورهنه درعاً من

حديث (رواه البخاري ومسلم).⁴

Artinya: Dari Aisyah ra. Bahwa Rasulullah Saw. Pernah membeli makanan dari seorang Yahudi secara tidak tunai dan beliau menggadaikan baju besinya. (HR. Bukhari dan Muslim).

عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه

وعليه غرمه (رواه البخاري ومسلم).⁵

Artinya: Dari Abu Hurairah ra., bahwasanya Rasulullah Saw. berkata: barang yang digadaikan itu tidak boleh ditutup dari pemilik yang menggadaikannya. Baginya adalah keuntungan dan tanggung jawabnya bila ada kerugian (atau biaya). (HR. Bukhari dan Muslim).

3. Ijma'

⁴ Muhammad asy-Syaukani, *Nail al-Autar*, Jaz V (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), h. 233.

⁵ Muhammad Ibn Isma'il al-Kahlani, *Subul as-Salam*, Juz III (Bandung: Maktabah Dahlan, t.th), h. 181.

Para ulama' telah sepakat bahwa gadai itu boleh, mereka tidak pernah mempertentangkan kebolehananya demikian pula landasan hukumnya. Jumhur ulama berpendapat bahwa gadai di syari'atkan pada waktu tidak berpergian dan waktu berpergian. Adapun transaksi gadai dalam masa perjalanan seperti yang dikaitkan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah Ayat 283.⁶

C. Rukun dan Syarat gadai

Rukun merupakan sesuatu yang mesti ada dalam sebuah akad atau transaksi. Tanpa rukun akad tidak akan sah, rukun mutlak adanya sebuah akad, layaknya sebuah transaksi gadai dapat dikatakan sah apabila memenuhi rukun dan syaratnya. Rukun akad menurut jumhur Ulama Syafi'iyah ada empat, yaitu : *Rahin* (orang yang menggadaikan), *murtahin* (orang yang menerima gadai), *marhun* (barang yang digadaikan), *marhun bih* (utang).⁷

⁶Mardani, *Fikih Ekonomi Syari'ah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012), h. 290.

Sedangkan rukun *rahn* terbagi tiga menurut ulama Syafi'i yaitu Imam

Nawawi yaitu :

أركان الرهن ثلاثة

1. عاقد ويشمل الطرفين : الراهن وهو المالك والمالك والمرتهن وهو صاحب الدين

الدى أخذ فى نظير دينه.

2. معقود عليه ويشمل أمرين : العين المرهونة والدين المرهون به

3. الصيغة الا أن أبا حنيفة لم يجعل للرهن الا ركنا واحدا وهو الايجاب والقبول لأنه هو حقيقة

العقد, وأما غيره فهو خارج عن ما هيته كما جاء ذلك فى البيع.⁸

Rukun *Rahn* ada 3 :

- 1) Orang yang berakad dua belah pihak : penggadaai adalah pemilik dari barang gadaian yang mana ia adalah yang punya hutang dari barang yang digadaikannya.
- 2) Penerima akad terbagi atas 2 perintah : adanya barang yang digadaikan dan hutang dari barang gadaian.

⁷Anshory Umar Sitanggal, *Fiqh Syafi'i Sistematis*, Jilid III (Semarang: CV. Asy syifa 1993), h. 84.

⁸Imam Nawawi, *Kitab al-majmu' sarah mazahib, jilid 12*, t,th, h. 302.

- 3) Shigat, kecuali Abu Hanifah tidak menjadikan untuk gadai kecuali hanya satu rukun yaitu ijab qabul karena itu sebenar-benar akad, yang mana gadai tersebut berbeda dengan jual-beli.

Syarat Rahnada tiga menurut ulama' Syafi'i yaitu Imam Nawawi, yaitu:

1. شرط العقد

2. شرط صحة, ويسعى شرط الجواز

3. شرط لزوم.⁹

- 1) Syarat akad
- 2) Syarat sah atau syarat kebolehanannya
- 3) Syarat untuk membolehkannya.

1. Syarat yang terkait dengan 2 orang yang berakad (*Rahin dan murtahin*).

Tidak diperselisihkan lagi bahwa diantara sifat-sifat orang yang menggadaikan bahwa ia tidak dilarang untuk bertindak sebagai orang yang dibenarkan untuk bertindak (artinya orang tersebut tidak berada dibawah pengampuan), jadi orang yang boleh melakukan *rahn* ialah orang yang

⁹*Ibid*, Jilid 12, h.303.

pandai bercakap yang boleh melakukan perbuatan hukum, yang ditandai dengan *aqil baliq, berakal sehat* dan *mampu melakukan akad*.¹⁰

2. Syarat *marhun* (barang yang digadaikan)

Marhun adalah barang yang dijadikan jaminan oleh *rahin*. Para Ulama fiqh sepakat mensyaratkan *marhun* sebagai pensyaratan barang dalam jual-beli, sehingga barang tersebut dapat dijual untuk memenuhi hak *murtahin*. Adapun persyaratannya antara lain:

- a) Barang jaminan itu boleh diperjual-belikan dan nilainya seimbang dengan utang
- b) Barang jaminan itu bernilai harta dan tidak boleh dimanfaatkan
- c) *Marhun* (barang gadai) harus jelas
- d) Barang jaminan milik sah *rahin* (penggadai)
- e) Barang jaminan tidak terkait dengan hak orang lain
- f) Barang jaminan berupa harta yang utuh dan dapat diserahkan pada waktu akad dan kemudian dipegang oleh yang menerima agunan dan barang jaminan boleh diserahkan baik materi maupun manfaatnya.

¹⁰Abu Ahmad Najieh, *Fiqh Mazhab Syafi'i*, cet. 1, (Bandung: Marja 2017), h. 235.

Disamping syarat-syarat diatas, para ulama' sepakat menyatakan bahwa rahn itu boleh dianggap sempurna apabila barang yang digadaikan itu secara hukum sudah berada ditangan pemberi utang, syarat yang terakhir (kesempurnaan *rahin*) oleh para ulama' disebut sebagai *qabah al-Marhun* (barang jaminan dikuasai secara hukum oleh pemberi piutang), syarat ini menjadi penting karena Allah menyatakan dalam surat al-baqarah ayat 283.¹¹

3. Syarat *marhun bih* (utang)

Marhun bih adalah hak yang diberikan ketika *rahn* telah terlaksana. Imam Syafi'i berpendapat yang kemudian diikuti oleh para Ulama Syafi'iyah memberikan syarat sebagai berikut:

- a) Berupa utang yang tetap dan dapat dimanfaatkan
- b) Utang boleh dilunasi dengan barang gadai
- c) Utang harus jelas dan diketahui oleh *rahin* dan *murtahin*.

4. Syarat Sighat (Lafadz Ijab qabul)

¹¹ *Ibid*, h. 236

Imam Syafi'i berpendapat bahwa syarat *sighat* tidak boleh terikat dalam *rahn*, tidak boleh memakai syarat atau dikaitkan dengan sesuatu. Hal ini dikarenakan, sebab *rahn* atau jual-beli, jika memakai syarat tertentu syarat tersebut batal dan *rahn* tetap sah. Misalnya orang yang menggadaikan hartanya mempersyaratkan tenggang waktu, uang habis dan utang belum dibayar, sehingga pihak penggadaian dapat diperpanjang tenggang waktunya, atau mensyaratkan harta agunan itu bisa ia manfaatkan. Kecuali jika syarat itu mendukung kelancaran akad maka diperbolehkan.

Sedangkan ulama Syafi'iyah berpendapat syarat dalam *rahn* ada yang *shahih* dan *fasid*. Sedangkan *rahn shahih* adalah *rahn* yang mengandung unsur kemaslahatan dan sesuai dengan kebutuhan, sedangkan *rahn fasid* adalah *rahn* yang didalamnya mengandung persyaratan yang tidak sesuai dengan kebutuhan atau di palingkan pada suatu yang haram.¹²

D. Berakhirnya Akad *Rahn* (Gadai)

Barang gadai adalah amanah yang ada ditangan pemegang gadai, ia tidak berkewajiban meminta ganti kecuali jika melewati batas waktu. Akad gadai berakhir dikarenakan beberapa hal, yaitu sebagai berikut :

¹² Abu Abdullah Muhammad Bin Idris Asy-Syafi'i, *Al-Umm*, jilid III, h.179.

1. Apabila sesudah transaksi, *murtahin* (orang yang menerima barang gadai) belum menerima barang gadai.
2. Sesudah jatuh tempo *murtahin* membuat persyaratan yang memberatkan *rahin* (orang yang menggadaikan barang), misalnya: barang harus ditebus dengan harga yang mahal dikarenakan perawatannya yang mahal (ini di luar kesepakatan akad)
3. Apabila orang yang berakad anak kecil orang bodoh atau orang gila.
4. Apabila *murtahin* mengambil hasil atau manfaat dari barang yang digadaikan *rahin*. Dalam hal ini *murtahin* mensyaratkan agar *rahin* member izin mengambil manfaat barang gadai, misalnya:
 - a) Apabila digadaikan sepetak kebun dengan syarat buah yang dihasilkannya juga termasuk dalam gadai
 - b) Apabila digadaikan sebidang tanah dengan syarat semua pohon yang ditanamkan adalah termasuk dalam gadaian.
 - c) Apabila digadaikan seorang budak lalu budak itu disewakan *murtahin* keorang lain.

d) Apabila digadaikan sebuah rumah lalu rumah disewakan oleh oleh murtahin guna mengambil keuntungan dari barang gadai itu (rumah)

5. Adanya kecacat pada barang

6. *Rahin* meninggal

7. Ditasarrufkan

Rahn dipandang berakhir apabila barang jaminan ditasarrufkan, seperti dijadikan hadiah, hibah, sedekah dan sebagainya atas izin pemiliknya .¹³

¹³*Ibid*, h.180.

BAB III

GAMBARAN UMUM DESA JABI-JABI KECAMATAN SULTAN DAULAT KOTA SUBULUSSALAM-ACEH

A. Letak Geografis

Desa Jabi-Jabi merupakan salah satu desa yang terdapat dikecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam-Aceh, desa ini termasuk desa DAS (Daerah Aliran Sungai). Berdasarkan data dari badan Statistik Kota Subulussalam, luas wilayah desa Jabi-Jabi adalah sekitar 1.109 Ha dengan jumlah penduduk mencapai 847 jiwa pada tahun 2018¹.

Secara administratif letak geografis desa Jabi-Jabi Kecamatan sultan Daulat berbatasan dengan :

1. Sebelah utara berbatasan dengan desa Suka Maju
2. Sebelah Timur berbatasan dengan desa Sigrun
3. Sebelah selatan berbatasan dengan persawahan desa Lae Langge
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Lae Soraya

¹ Badan Statistik Kota Subulussalam tahun 2018.

Dengan luas wilayah \pm 1.109 Ha dan 210 KK (Kepala Keluarga), dimana hanya sekitar 200 Ha wilayah pemukiman masyarakat mempunyai iklim seperti hujan dan kamarau, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanaman di Desa Jabi-jabi.

B. Kondisi Demografis

Aspek demografis adalah aspek tentang populasi manusia pada daerah tertentu dalam waktu tertentu.

Dalam penelitian ini akan ditampilkan sejumlah table demografis desa Jabi-Jabi sebagai berikut:

Tabel 1

Jumlah Penduduk Desa Jabi-Jabi Berdasarkan Jenis Kelamin

NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH	KETERANGAN
1	Laki-Laki	426 Jiwa	50,29%
2	Perempuan	421 Jiwa	49,70%
3	Jumlah	847 Jiwa	100,00%

Sumber: *Data Statistic Kantor Desa Jabi-jabi tahun 2018.*

Tabel 2

Sarana Pemerintahan yang ada di Desa Jabi-Jabi Kecamatan Sultan Daulat

NO	SARANA PEMERINTAHAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	Balai Desa	1 unit	
2	Kantor Kepala Desa	1 unit	
3	Balai PKK	1 unit	tidak aktif

Sumber: *Data Statistic Kantor Desa Jabi-jabi tahun 2018.*

Masyarakat desa Jabi-Jabi dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, mengandalkan hasil bumi seperti jagung, sawit dan kakao hanya 2 persen sebagai wiraswasta dan ada juga sebagai buruh. Lambatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan sehingga masyarakat desa Jabi-Jabi sampai saat ini belum ada yang bergerak dipemerintahan, tercatat hanya 7 orang yang baru saja menyelesaikan studi diperguruan tinggi. Hal ini disebabkan factor ekonomi dan imbas konflik panjang antara GAM dan Pemerintah Indonesia.

Pada tahun 2008 pemerintah Subulussalam bekerja keras untuk mengembalikan perekonomian Masyarakat hingga pada tahun 2010 terlihat

ekonomi masyarakat mulai membaik, seiring membaiknya roda perekonomian masyarakat desa Jabi-Jabi maka semakin banyak pula anak-anak yang dapat menyelesaikan pendidikan sampai jenjang SLTA dan sampai ke perguruan tinggi.

a. Aspek Pendidikan

Konsep dan realitas Negara Republik Indonesia sangat peduli dengan dunia pendidikan formal maupun yang bersifat non formal. Hal ini nampak dari kebijakan dengan mengeluarkan peraturan-peraturan yang diberlakukan sebagai perundang-undangan untuk memberi legitimasi legalisasi akan pentingnya dunia pendidikan bagi sebuah Negara, termasuk yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Secara realita dapat dilihat maju mundurnya sebuah Negara tergantung dari dunia pendidikan yang ada. Pendidikan yang merupakan suatu hal yang urgen demi menaikkan martabat dan kualitas suatu bangsa dan manusia itu sendiri.

Perhatian Negara Republik Indonesia terhadap dunia pendidikan dapat dilihat melalui penjelasan undang-undang sistem pendidikan nasional nomor 20 tahun 2003 dalam pasal 3 yaitu, pendidikan nasional yang berfungsi

mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi serta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.²

Penjelasan diatas memberikan pemahaman bahwa pendidikan bagi bangsa Indonesia bertujuan untuk menjadikan sebuah Negara beradab sekaligus bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan suatu Negara. Secara konsep dijelaskan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.³

²Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Jakarta: CV.Medya Duta, 2003), h 5.

³*Ibid*, h. 2.

Meskipun pemerintah sudah berupaya semaksimal mungkin dalam meningkat kualitas pendidikan namun dimasyarakat Jabi-Jabi pada umumnya tingkat pendidikan masyarakat Jabi-Jabi adalah yang tamat / tidak tamat. Dibawah ini akan dijelaskan table tingkat pendidikan masyarakat di Desa Jabi-Jabi Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam-Aceh.

Tabel 3

Sarana Pendidikan Desa Jabi-Jabi Kecamatan Sultan Daulat

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH	Keterangan
1	TK	1 unit	
2	TPA	1 unit	
3	Sekolah Dasar (SD)	1 unit	
4	SLTP	1 unit	
5	SLTA	1 unit	
Jumlah		5 unit	

Sumber: *Data Statistic Kantor Desa Jabi-jabi tahun 2018.*

Table diatas dapat diketahui bahwa rendahnya tingkat pendidikan pada umumnya adalah mereka yang sudah berkeluarga. Hal ini disebabkan lambatnya masuk sarana pendidikan didesa Jabi-Jabi itu sendiri maupun didesa

yang berdekatan. Barulah pada awal tahun 2001 pemerintah membangun sekolah SMP didesa Lae langge yang tidak jauh dari desa Jabi-Jabi serta membangun sekolah SMA didesa Jambi Baru. Meskipun pemerintah sudah membangun dua sekolah tingkat SMP dan SMA dikecamatan Sultan Daulat, tetapi karena jauhnya jarak tempuh terutama ke SMA didesa Jambi Baru sehingga banyak yang tidak melanjutkan ketingkat SMA. Pada tahun 2008 pemerintah memberikan bantuan Bus Sekolah yang siap mengantar-jemput setiap siswa yang berangkat sekolah, dengan adanya Bus sekolah bantuan pemerintah tersebut maka mulai terlihat antusias masyarakat terutama orang tua untuk mendorong anak-anaknya melanjutkan sekolah. Selanjutnya untuk mengetahui tentang tingkat pendidikan masyarakat Desa Jabi-jabi Kecamatan Sultan Daulat, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4

Persentase Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Jabi-Jabi

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	SD	121 orang	14,28%
2	SLTP	6 orang	0,70%

3	SLTA	24 orang	2,83%
4	Mahasiswa	19 orang	2,24%
5	Sarjana	7 orang	0,82%
6	Tidak sekolah	670 orang	79,10%
Jumlah		847	100,00%

Sumber: *Data Statistic Kantor Desa Jabi-jabi tahun 2018.*

b. Mata Pencaharian

Ekonomi merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia, dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Masyarakat Desa Jabi-jabi Kecamatan Sultan Daulat menekuni berbagai jenis profesi. Sebagian masyarakat ada yang berprofesi sebagai petani, buruh pegawai, dan sebagian lagi ada pedagang dan lain-lain sebagainya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5

Penduduk berdasarkan Mata Pencaharian

NO	Pekerjaan	Jumlah Penduduk
----	-----------	-----------------

1	PNS	2 orang
2	Pedagang	14 orang
3	Tani	831 orang
Jumlah		847 orang

Sumber: *Data Statistic Kantor Desa Jabi-jabi tahun 2018*

c. Aspek Agama

Secara keseluruhan masyarakat desa Jabi-Jabi adalah penganut agama Islam dan bermazhab Imam Syafi'i, oleh sebab itu keberadaan masjid dan mushalla mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam mendekatkan diri kepada Allah SWT. Selain itu masjid atau mushalla adalah sarana yang baik dalam belajar agama. Dapat dilihat dilapangan bahwa kegiatan belajar agama di masjid maupun dimushalla terbilang aktif dapat dibuktikan bahwa rutinitas keagamaan yang aktif seperti pengajian mingguan sekaligus wirid yasin.

Berdasarkan pengamatan penulis rutinitas keagamaan yang bersifat aktif yaitu wirid yasin dan kegiatan ini dilakukan oleh kaum Ibu saja setiap hari jumat. Sementara bagi kaum Bapak rutinitas keagamaan adalah pengajian yang diadakan setiap 1 bulan sekali, selain itu kebiasaan masyarakat desa Jabi-Jabi pada setiap kali ada acara baik pesta khitanan, pernikahan maupun musibah

kematian biasanya akan diundang penceramah untuk menyampaikan tausiyah tentang keagamaan. Sementara kegiatan bagi anak-anak dalam belajar membaca dan menulis arab serta ilmu agama lainnya dilakukan setelah shalat dzuhur di Madrasah Ibtidaiyah dan belajar Al-Qur'an setelah shalat makhrub di Mushalla. Adapun sarana peribadatan didesa Jabi-Jabi adalah sebagai berikut :

Tabel 6

Sarana Peribadatan di Desa Jabi-Jabi

NO	SARANA IBADAH	JUMLAH	KETERANGAN
1	Masjid	1 unit	
2	Mushalla	3 unit	
Jumlah		4 unit	

Sumber: *Data Statistic Kantor Desa Jabi-jabi tahun 2018.*

d. Adat Istiadat

Negara Indonesia adalah salah satu Negara yang berbudaya dan mempunyai adat istiadat yang dapat dihandalkan dalam dunia Internasional. Hal ini disebabkan Negara Republik Indonesia mempunyai beberapa macam suku

yang memiliki adat istiadat yang berbeda-beda antara yang satu dengan yang lainnya.

Adat istiadat adalah sebuah kebudayaan yang sudah menjadi ketentuan daerah tersebut. Salah satu contoh adat istiadat yang menjadi kebiasaan bagi masyarakat Desa Jabi-Jabi Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam-Aceh adalah dapat dilihat dari kebiasaan yang dilakukan masyarakat Desa Jabi-Jabi terutama dalam acara Khitanan dan pernikahan harus melaksanakan mandi tepung tawar dan melaksanakan tari dampeng pada pagi hari dengan tujuan untuk membuang sial dan menyambut tamu-tamu khusus seperti Kepala Desa dan masyarakat.

BAB IV

ANALISIS TERHADAP PRAKTEK RAHN DIDESA JABI-JABI DITINJAU PERESPEKTIF IMAM SYAFI'I

A. Hukum Menggadaikan Harta Anak Yatim Sebagai Jaminan Utang Ditinjau Perspektif Imam Syafi'i

Adapun hukum menggadaikan harta anak yatim untuk dijadikan jaminan utang oleh wali menurut pendapat Imam Syafi'i adalah :

قال الشافعي: لا يجوز أرتهانه إلا فيما يفضل لنفسه, أو يتيمة, أو ابنه, من أبي ولد, وولي يتيمة,
ومكاتب, وعبد مأذون له, فلا يجوز أن يرهن شيئاً, لأن الرهن أمانة, ولدين لازم, فالرهن بكل حال
نقص عليهم.¹

Artinya : Tidak boleh menggadaikannya melainkan pada sesuatu yang lebih terhadap dirinya, atau anak yatimnya, atau anaknya sendiri, dari pada bapak si anak, dan wali anak yatim, dan budak mukatab, dan hamba yang diizinkan baginya, maka ia tidak boleh menggadaikan sesuatu

¹Abu Abdullah Muhammad Bin Idris Asy- Syafi'i, *Al- Umm, Jilid III* (Beurit: Dal Al- Kutub Al-Ilmiyah), h.177.

apapun, karena gadai merupakan amanah, sedangkan utang itu merupakan kelajiman, maka gadai setiap keadaan itu kurangnya atas mereka.

Berdasarkan pendapat Imam Syafi'i di atas dapat penulis simpulkan bahwa praktek gadai yang dilakukan oleh wali yatim di Desa Jabi-Jabi Kecamatan Sultan Daulat tidak sah, karena barang yang dijadikan objek gadai tersebut merupakan harta anak yatim yang dititipkan kepadanya, sementara wali yatim menggadikan harta tersebut untuk keperluan pribadi sebagai jaminan utang.

Adapun pendapat Imam Syafi'i mengenai pelaksanaan gadai yang sah adalah. Bahwa harta gadai yang sah adalah harta gadai yang dimiliki penuh oleh penggadai, harta gadai itu tidak memikul tanggungan atas sesuatu kejahatan dimana korban kejahatan lebih berhak terhadapnya dari pada pemiliknya hingga hak korban itu terpenuhi, harta gadai itu tidak terkait dengan hak orang lain.

Menunjukkan beberapa syarat sah yang di kemukakan oleh imam Syafi'i di atas, jelas bahwa harta yang dijadikan objek gadai itu harus milik kita sendiri bukan milik orang lain dan meminjam harta orang lain harus seizin pemiliknya, namun barang atau objek gadai tersebut adalah milik anak yatim yang sedang diampu, dan harta anak yatim tersebut dijadikan sebagai jaminan utang untuk keperluan pribadi pihak wali. Seperti yang terjadi di Desa Jabi-Jabi Kecamatan Sultan Daulat bahwa masyarakat di Desa tersebut melakukan praktek gadai terhadap harta anak yatim yang sedang diampunya pendapat diatas bahwa. Firman Allah SWT menyebutkan didalam Al-qur'an sebagai berikut: (QS. An-Nisa [4]: 2).

وَأُتُوا الْيَتَمَىٰ أَمْوَالَهُمْ^ط وَلَا تَبَدَّلُوا الْخَيْرَ بِالْطَّيِّبِ^ط وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ
أَمْوَالِكُمْ^ج إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا ﴿٦٠﴾

Artinya: Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah dewasa) harta mereka, janganlah kamu menukar yang baik dengan yang buruk, dan janganlah kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sungguh (tindakan menukar dan memakan) itu adalah dosa besar.²

Sedangkan didalam hadits Nabi SAW menjelaskan tentang larangan memakan harta anak yatim sebagai berikut:

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات قالوا يا رسول

الله وما من قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق وأكل الربا وأكل

مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات (رواه البخاري).³

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Solo: PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2003), h. 77.

³ Muhammad asy-Syaukani, *Nail al-Autar*, Jaz V (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), h.236

Artinya: Dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda: "jauhilah tujuh (dosa) yang membinasakan mereka (para sahabat) bertanya: "wahai Rasullullah, apakah itu? "beliau menjawab, "syirik kepada Allah; sihir, membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan haq, memakan riba, memakan harta anak yatim, berpaling dari perang yang berkecamuk menuduh zinah terhadap wanita-wanita merdeka yang menjaga kehormatannya, yang beriman, dan yang bersih dari zinah".(HR. Bukhari).

Berdasarkan penjelasan di atas tersebut, bahwa menggadaikan harta atau barang anak yatim sebagai jaminan utang untuk keperluan pribadi pihak wali hukumnya tidak sah atau tidak sesuai dengan pendapat Imam Syafi'I dan bertentangan dengan Syari'at Islam.

B. Pelaksanaan Gadai Harta Anak Yatim di Desa Jabi-jabi Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam-Aceh

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa gadai merupakan kebutuhan yang tidak bisa lepas dari kehidupan manusia, sebab dengan akad

gadai manusia bisa mendapatkan apa yang ia inginkan untuk memenuhi kebutuhannya, baik kebutuhan primer maupun kebutuhan sekunder termasuk apa yang dilakukan oleh masyarakat Desa Jabi-Jabi.

Realita yang terjadi di Desa Jabi-jabi Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam- Aceh tentang pelaksanaan gadai yang banyak dilakukan dikalangan masyarakat, ada terdapat beberapa orang yang melakukan transaksi gadai dengan menggadaikan harta anak yatim untuk dijadikan sebagai jaminan utang.

Adapun gambaran prakteknya dapat dikemukakan sebagai berikut: si A meminjam sejumlah uang kepada B. Namun selang beberapa tahun si B meminta uangnya kepada si A yang sudah jatuh tempo pembayaran, karena si B sangat membutuhkan uang untuk keperluan rumah tangganya. Sementara si A belum mempunyai uang untuk membayar utang kepada si B, kemudian si A mengambil harta atau barang anak yatim untuk digadaikan kepada orang lain, dan dari hasil gadai tersebut sesuai dengan besar hutangnya kepada si B, hasil gadai tersebut untuk melunasi utang kepada si B. Dengan demikian, dalam hal

ini, si A menggadaikan barang atau harta yang bukan hak milinya sendiri, melainkan barang atau harta yang digadaikan merupakan milik anak yatim untuk dijadikan sebagai pembayar hutang pribadinya kepada si B. Untuk lebih jelasnya bagaimana pelaksanaan gadai yang dilakukan oleh wali yatim di Desa Jabi-jabi Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam dapat diuraikan sebagai berikut.

Kasus Pertama : Berdasarkan hasil wawancara dengan “Bapak Mansur” selaku wali dari anak yatim dan “Bapak Jahidin” selaku murtahin (penerima gadai) di Desa Jabi-Jabi Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam-Aceh, dimana Bapak Mansur adalah paman kandung dari anak yatim yang bernama “Sulaiman”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Mansur “ia mengatakan telah menggadaikan harta anak yatim untuk keperluan pribadi dimana bapak Mansur menggadaikan harta atau barang gadai tersebut ialah berupa emas sebesar 10 gram, dan Bapak Mansur menggadaikan harta atau barang tersebut karna keperluan mendesak yaitu untuk membayar utang kepada Bapak Budi,

karana Bapak Budi telah mendesak Bapak Mansur untuk melunasi utangnya, karena telah jatuh tempo dan juga Bapak Budi sangat membutuhkan biaya untuk membayar perawatan anaknya yang sedang dirawat dirumah sakit, maka dari itulah, Bapak Mansur sanggup menggadaikan harta anak yatim yang sedang dalam pengampuannya, dan karena faktor kurangnya ilmu pengetahuan mengenai muamalah khususnya mengenai *rahn* (gadai) maka terjadilah gadai yang tidak sesuai atau tidak sejalan dengan pendapat Imam Syafi'i tentang hukum menggadaikan harta anak yatim".⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Jahidin, dimana Bapak Jahidin mengatakan bahwa Bapak Mansur menggadaikan emas sebanyak 10 gram sebagai jaminan utang terhadap uang yang dipinjamnya, berdasarkan barang gadai tersebut Bapak Mansur mendapatkan pinjaman dari Bapak Jahidin sebesar Rp. 3.800.000,-. Akan tetapi Bapak Jahidin selaku *murtahin* (orang yang menerima barang gadai) tidak mengetahui bahwa barang atau harta yang dijadikan sebagai objek gadai merupakan milik dari anak yatim yang sedang

⁴ Bapak Mansur, pihak Penggadai harta anak yatim, *wawancara pribadi*, 16:00 Wib. Jabi-Jabi 3 Oktober 2018.

diampu oleh Bapak Mansur. Dan Bapak Jahidin juga mengatakan bahwa ia tidak mengetahui tentang pendapat Imam Syafi'i bagaimana praktek atau pelaksanaan gadai yang seharusnya, maka dari itu Bapak Jahidin mengatakan terjadilah praktek gadai yang tidak sesuai dengan Syari'at Islam dan juga pendapat Imam Syafi'i tentang hukum menggadaikan harta anak yatim.⁵

Praktek menggadaikan harta anak yatim berupa emas yang dilakukan oleh Bapak Mansur usia 40 tahun dan bertempat tinggal di Desa Jabi-Jabi Dusun Makmur Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam Aceh. Bapak Mansur menggadaikan harta anak yatim yang sedang dalam pengampuannya berupa emas sebesar 10 gram sebagai jaminan utang kepada Bapak Jahidin selaku (*murtahin*) usia 36 tahun dan bertempat tinggal di Desa Jabi-Jabi Dusun Makmur Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam Aceh, dan transaksi gadai tersebut terjadi sejak tanggal 10 Juni 2011 samapai dengan tanggal 10 Juni 2012 dan Bapak Mansur meminjam uang sebesar Rp. 3.800.000,-.

⁵ Bapak Jahidin, pihak menerima gadai, *wawancara pribadi*, 15:30 Wib. Jabi-jabi 5 Oktober 2018.

Sistem pengembalian atau pembayaran pinjaman yang dilakukan oleh Bapak Mansur kepada Bapak Jahidin yaitu kontan (tunai) yaitu sesuai dengan perjanjian diawal akad. Transaksi yang dilakukan oleh Bapak Mansur Dan Bapak Jahidin telah berakhir tanggal 10 Juni 2012 yang dalam pelunasannya Bapak Mansur membayar utangnya secara kontan atau tunai sebesar Rp. 3.800.000,-. Karena Bapak Mansur telah melunasi hutangnya maka emas yang dijadikan objek gadai tersebut telah dikembalikan oleh Bapak Jahidin selaku (*murtahin*).

Kasus kedua Berdasarkan hasil wawancara dengan “Ibu Masna” (*rahin*) selaku wali dari anak yatim dan “Bapak Muliadi” (*murtahin*) selaku penerima barang gadai, di Desa Jabi-Jabi Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam-Aceh, dimana Ibu Masna adalah kakak kandungan dari anak yatim yang bernama “Nurindah” yang berusia 4 tahun.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Masna selaku *rahin* (orang yang menggadikan), ia mengatakan bahwa ia pernah menggadikan harta atau barang dalam hal ini sepeda motor anak yatim yang sedang diampunya sebagai

jaminan utang terhadap pinjaman dari Bapak Musliadi selaku *murtahin* (orang yang menerima barang gadai) anak yatim yang diampu oleh Ibu Masna merupakan anak kakak kandung dari Ibu Masna, yang bernama Nurindah yang berusia 4 tahun. Ibu Masna menerima pinjam atas barang yang digadaikannya sebesar Rp. 6.000.000, untuk keperluan pribadi yaitu untuk membuka toko grosir.

Maka dalam hal ini Ibu Masna menggadaikan harta berupa sepeda motor milik anak yatim yang sedang diampunya itu untuk menambah pembiayaan tokonya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Masna di atas, ia menggadaikan sepeda motor anak yatim tersebut, karena kurangnya ilmu pengetahuan tentang muamalah khususnya mengenai *rahn* (gadai), karena kurangnya pengetahuan inilah maka terjadi praktek gadai yang tidak sesuai dengan Syari'at Islam dan juga menyalahi pendapat Imam Sayfi'i.⁶

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Musliadi selaku *murtahin* (orang yang menerima barang gadai) ia mengatakan bahwa Ibu Masna telah

⁶ Ibu Masna, Pihak Penggadai harta anak yatim, wawancara Pribadi, 10:30 Wib. Jabi-Jabi 8 Oktober 2018.

meminjam uang kepadanya Sebesar 6.000,000,. sebagai jaminan atas pinjaman uang tersebut. Ibu Masna menggadaikan harta berupa sepeda motor milik anak yatim sebagai penambahan modal pembiayaan toko grosirnya atau untuk kebutuhan lainnya, dan Ibu Masna juga mengatakan bahwa sepeda motor yang digadaikan oleh Ibu Masna merupakan harta milik anak yatim yang sedang dibawah perwaliannya. Dan Bapak Musliadi mengatakan bahwa tidak mengetahui bagaiman pendapat Imam Syafi'i tentang praktek gadai menurut Syari'at.⁷

Praktek menggadaikan harta anak yatim berupa Sepeda Motor yang dilakkan oleh Ibu Masna usia 39 tahun dan bertempat tinggal di Desa Jabi-Jabi Dusun Aman Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam Aceh. Ibu Masna menggadaikan harta anak yatim yang sedang dalam pengampuannya berupa sepeda motor sebagai jaminan utang kepada Bapak Muliadi selaku (*murtahin*) usia 35 tahun dan bertempat tinggal di Desa Jabi-Jabi Dusun Lembang Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam Aceh, dan transaksi gadai tersebut

⁷ Bapak Musliadi, Pihak Penerima gadai harta anak yatim, Wawancara Pribadi, 11:00 Wib. Jabi-Jabi 8 Oktober 2018.

terjadi sejak tanggal 03 Januari 2010 samapai dengan tanggal 03 Januari 2011 dan Ibu Masna meminjam uang sebesar Rp. 6.000.000,-.

Sistem pengembalian atau pembayaran pinjaman yang dilakukan oleh Ibu Masna kepada Bapak Muliadi yaitu kontan (tunai) yaitu sesuai dengan perjanjian diawal akad. Transaksi yang dilakukan oleh Ibu Masna Dan Bapak Muliadi telah berakhir tanggal 03 Januari 2011 yang dalam pelunasannya Ibu Masna membayar utangnya secara kontan atau tunai sebesar Rp. 6.000.000,-. Karena Ibu Masna telah melunasi hutangnya maka Sepeda Motor yang dijadikan objek gadai tersebut telah dikembalikan oleh Bapak Muliadi selaku (*murtahin*).

Kasus ketiga Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Alimin (*rahin*) selaku wali dari anak yatim dan Bapak Jufri (*murtahin*) selaku penerima barang gadai, di Desa Jabi-Jabi Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam-Aceh, dimana Bapak Alimin adalah adik kandungan dari ayah anak yatim, anak tersebut bernama Khaidir yang berusia 7 tahun.

Hasil wawancara dengan Bapak Alimin selaku *rahin* (orang yang menggadaikan). Adapun anak yatim ini merupakan anak kandung dari abang

Bapak Alimin, Bapak Alimin mengatakan bahwa ia pernah menggadaikan harta atau barang anak yatim yang dalam hal ini adalah Rumah kepada Bapak Jufri selaku *murtahin* (orang yang menerima barang gadai) sebagai jaminan utang Bapak Alimin kepada Bapak Jufri, berdasarkan dari barang yang digadaikan tersebut Bapak Alimin mendapatkan pinjaman sebesar Rp. 20.000.000,-. Rumah yang dijadikan sebagai objek gadai oleh Bapak Alimin merupakan harta dari anak yatim yang sedang diampunya, ia juga mengatakan bahwa ia menggadaikan rumah tersebut untuk keperluan atau kepentingan pribadi yaitu untuk tambahan biaya membuka lahan pokok kelapa sawit, karna faktor inilah Bapak Alimin menggadaikan harta anak yatim tersebut, dan Bapak Alimin juga mengatakan bahwa ia akan mengembalikan harta anak yatim tersebut, setelah pokok sawitnya sudah menghasilkan dan sudah bisa untuk di panen. Berdasarkan hasil wawancara mengenai hukum menggadaikan harta anak yatim Bapak Alimin tidak memahami atau tidak mengetahui hukum menggadaikan harta anak yatim menurut Imam Syafi'I dan praktek gadai yang sesuai dengan Syari'at Islam.⁸

Hasil wawancara dengan Bapak Jufri selaku *murtahin* (orang yang menerima barang gadai) ia mengatakan bahwa Bapak Alimin telah meminjam uang kepadanya Sebesar Rp. 20.000,000,. sebagai jaminan atas pinjaman uang tersebut, Bapak Alimin menggadaikan Rumah milik anak tersebut untuk keperluan atau kepentingan pribadi yaitu untuk tambahan biaya membuka lahan pokok kelapa sawit, Dan Bapak Jufri mengatakan bahwa tidak mengetahui bagaimana pendapat Imam Syafi'i tentang hukum menggadaikan harta anak yatim dan bagaimana praktek gadai yang sah menurut Syari'at Islam.⁹

Praktek menggadaikan harta anak yatim berupa Rumah peninggalan ayah anak yatim yang dilakukan oleh Bapak Alimin usia 45 tahun dan bertempat tinggal di Desa Jabi-Jabi Dusun Aman Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam Aceh. Bapak Alimin menggadaikan harta anak yatim yang sedang dalam pengampuannya berupa Rumah Peninggalan ayah anak yatim sebagai jaminan utang kepada Bapak Jufri selaku (*murtahin*) usia 30 tahun dan

⁸ Bapak Alimin, Pihak Penggadai harta anak yatim. Wawancara Pribadi, 13:30 Wib. Jabi-Jabi 9 Oktober 2018.

⁹ Bapak Jufri, Pihak Penerima gadai harta anak yatim, Wawancara Pribadi, 11:00 Wib. Jabi-Jabi 9 Oktober 2018.

bertempat tinggal di Desa Jabi-Jabi Dusun Bahagia Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam Aceh, dan transaksi gadai tersebut terjadi sejak tanggal 07 Maret 2013 samapai dengan tanggal 07 Januari 2015 dan Bapak Alimin meminjam uang sebesar Rp. 20.000.000,-.

Sistem pengembalian atau pembayaran pinjaman yang dilakukan oleh Ibu Masna kepada Bapak Jufri yaitu cicilan yaitu sesuai dengan perjanjian diawal akad. Transaksi yang dilakukan oleh Bapak Alimin Dan Bapak Jufri telah berakhir tanggal 07 Maret 2015 yang dalam pelunasannya Bapak Alimin membayar utangnya secara cicilan sebesar Rp. 850,000 perbulan,-. Karena Bapak Alimin telah melunasi hutangnya maka Rumah yang dijadikan objek gadai tersebut telah dikembalikan oleh Bapak Jufri selaku (*murtahin*).

Kasus Keempat Berdasarkan hasil wawancara dengan “Ibu Jumiah” selaku wali dari anak yatim dan “Bapak Juhari” selaku penerima barang gadai, di Desa Jabi-Jabi Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam-Aceh, dimana

Ibu Jumiah adalah kakak kandung dari anak yatim yang bernama. “Malawati” yang berumur 6 tahun.

Hasil wawancara dengan Ibuk Jumiah selaku rahin (orang yang menggadaikan) ia pernah mengatakan bahwa ia pernah menggadaikan harta atau barang milik anak yatim yang sedang diampunya, adapun jenis barang yang digadaikan adalah Sawah milik anak yatim kepada Bapak Juhari selaku *murtahin* (orang yang menerima barang gadai) selama satu tahun setengah dan Ibuk Jumiah meminjam uang sebesar Rp. 15. 000,000,. Kepada Bapak Juhari untuk keperluan membayar uang sewa rumah yang sedang ditempatinya. Berdasarkan wawancara dengan Ibu Jumiah tersebut bahwa ia menggadaikan harta tersebut dikarenakan kurang uang, dan adapun alasan Ibu Jumiah terhadap menggadaikan harta anak yatim dikarenakan kurangnya pengetahuan dalam hal praktek gadai, karena kurang pengetahuan tentang hukum menggadaikan harta anak yatim menurut pendapat Imam Syafi’i maka terjadi praktek gadai yang tidak sesuai dengan Syari’at Islam.¹⁰

Hasil wawancara dengan Bapak Juhari selaku *murtahin* (orang yang menerima gadai) ia mengatakan bahwa Ibu Jumiah telah meminjam uang kepadanya sebesar Rp. 17.000,000,. Sebagai jaminan atas pinjaman atas uang pinjam tersebut. Ibu Jumiah menggadaikan harta anak yatim berupa sawah milik anak yatim untuk keperluan membayar uang sewa rumahnya. Dan Bapak Juhari mengatakan bahwa tidak mengetahui bagaimana pendapat Imam Syafi'i tentang hukum menggadai harta anak yatim.¹¹

Praktek menggadaikan harta anak yatim berupa Sawah milik anak yatim yang dilakukan oleh Ibu Jumiah usia 37 tahun dan bertempat tinggal di Desa Jabi-Jabi Dusun Makmur Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam Aceh. Ibu Jumiah menggadaikan harta anak yatim yang sedang dalam pengampuannya berupa Sawah milik anak yatim sebagai jaminan utang kepada Bapak Juhari selaku (*murtahin*) usia 49 tahun dan bertempat tinggal di Desa Jabi-Jabi Dusun Makmur Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam Aceh,

¹⁰ Wawancara dengan Ibu Jumiah Pihak penggadai harta anak yatim, 08:00 Wib. Jabi-Jabi 8 Oktober 2018.

¹¹ Wawancara Pribadi dengan Bapak Juhari, pihak penerima gadai, 08:30 Wib. Jabi-Jabi 8 Oktober 2018.

dan transaksi gadai tersebut terjadi sejak tanggal 11 September 2016 samapai dengan tanggal 11 September 2017 dan Ibu Jumiah meminjam uang sebesar Rp. 15.000.000,-.

Sistem pengembalian atau pembayaran pinjaman yang dilakukan oleh Ibu Jumiah kepada Bapak Juhari yaitu kontan (tunai) yaitu sesuai dengan perjanjian diawal akad. Transaksi yang dilakukan oleh Ibu Jumiah Dan Bapak Juhari telah berakhir tanggal 11 September 2017 yang dalam pelunasannya Ibu Jumiah membayar utangnya secara kontan atau tunai sebesar Rp. 15.000.000,-. Karena Bapak Mansur telah melunasi hutangnya maka Sawah milik anak yatim yang dijadikan objek gadai tersebut telah dikembalikan oleh Bapak Juhari selaku (*murtahin*), jika melanggar perjanjian yang telah disepakati maka harta gadai tersebut akan menjadi milik hak milik Bapak Juhari.

Faktor yang menjadi penyebab terjadinya transaksi gadai diatas, yang di lakukan oleh wali yatim terhadap harta atau barang yang dijadikan objek gadai di Desa Jabi-Jabi Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam Aceh adalah dikarenakan kurangnya beaya kebutuhan hidup yang menjadi salah satu faktor

pemicu. Adapun faktor penyebab tersebut sebagai berikut: untuk membayar biaya perawatan di rumah sakit, untuk penambahan modal pembiayaan toko grosir, untuk membuka lahan pokok kelapa sawit dan untuk membayar sewa rumah sehingga terjadi penggadaiaan harta atau barang milik anak yatim tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan para pihak yang melakukan transaksi gadai dari kasus pertama hingga kasus keempat, bahwa transaksi gadai yang terjadi di Desa Jabi-Jabi Kecamatan Sultan Daulat Subulussalam Aceh, masyarakat tersebut menggadaikan harta/barang anak yatim tersebut bukan kepada lembaga pengadaian atau ke Bank, akan tetapi masyarakat melakukan transaksi gadai kepada perorangan saja yaitu sesama masyarakat di Desa tersebut.

Menurut penulis terkait dengan peraktek gadai harta anak yatim diatas, bahwa masyarakat pada umumnya termasuk awam dalam pemahaman tentang pelaksanaan gadai khususnya tentang menggadaikan harta anak yatim yang sesuai dengan anjuran oleh syari'at Islam yang dimana masyarakat Desa Jabi-

Jabi Kecamatan Sultan Daulat masih membutuhkan pendidikan yang terkait dengan muamalah untuk dapat menghindari masyarakat melakukan transaksi gadai yang tidak sesuai dengan syari'at yang telah diajarkan. Masyarakat juga harus belajar tentang batasan-batasan hukum supaya kegiatan transaksi menggadaikan harta anak yatim tersebut bisa terhindar, sehingga peneliti merasa bahwa masyarakat perlu untuk mengetahui tentang pelaksanaan gadai yang sesuai dengan Syari'at Islam dan pendapat Imam Syafi'i. Dengan demikian bahwa jelaslah pelaksanaan gadai di atas tersebut tidak sesuai dengan pendapat Imam Syafi'i, sebab menggadaikan harta anak yatim tidak boleh dan transaksi tersebut tidak sah, karena dapat merugikan anak yatim.

C. Pelaksanaan Gadai Oleh Wali Anak Yatim di Desa Jabi-jabi

Ditinjau dari Perspektif Imam Syafi'i

Pelaksanaan menggadaikan harta atau barang yang dilakukan oleh wali anak yatim yang tidak dimiliki penuh oleh penggadai dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis, penulis mengangkat dalil atas penetapan hukum dari kitab *Al-Umm* yang pembahasannya mengenai *rahn* (gadai).

Rahn (gadai) adalah menjadikan suatu barang sebagai jaminan atas utang, dengan ketentuan bahwa apabila terjadi kesulitan dalam pembayarannya maka utang tersebut bisa dibayar dari hasil penjualan barang yang dijadikan jaminan itu.¹²

Dalam hal *rahn* (gadai) terdapat rukun dan syarat-syarat yang harus dipenuhi jika suatu rukun atau syarat *rahn* itu belum terpenuhi atau belum terlaksana maka transaksi gadai itu tidak sah. Maka dari itu pada penelitian ini penulis mengarah kepada pernyataan pendapat Imam Syafi'i yaitu sebagai berikut:

قال الثافعي: لا يجوز ارتهانه إلا فيما يفضل لنفسه, أو يتيمه, أو ابنه, من أبي ولد, وولي يتيم, ومكاتب, وعبد مأذون له, فلا يجوز أن يرهن شيئاً, لأن الرهن أمانة, ولدين لازم, فالرهن بكل حال نق عليهم.¹³

Artinya: Tidak boleh menggadaikannya melainkan pada sesuatu yang lebih terhadap dirinya, atau anak yatimnya, atau anaknya sendiri, dari pada

¹² Ahmad Wardi Muslich, *fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2013), h. 288.

¹³ Abu Abdullah Muhammad bin Idris, Asy-Syafi'i, *Kitab Al-Umm*, h. 177.

bapak sianak, dan wali anak yatim, dan budak mukatab, dan hamba yang diizinkan baginya, maka ia tidak boleh menggadaikan sesuatu apapun, karena gadai merupakan amanah, sedangkan utang itu merupakan kelaziman, maka gadai setiap keadaan itu kurangnya atas mereka.

Kesimpulan dari kitab tersebut adalah bahwa *rahn* (gadai) boleh dilaksanakan apabila terpenuhinya rukun dan syarat-syaratnya, yaitu harta atau barang yang digadaikan harus milik sendiri bukan milik atau hak orang lain, terutama dalam hal ini yang menjadi objek gadai disini adalah harta anak yatim yang sedang dalam ampunan si penggadai maka dari itu penggadai harus mempunyai atau memiliki barang secara penuh untuk dijadikan sebagai objek gadai bukan milik orang lain yang dalam hal ini adalah harta anak yatim yang sedang dalam ampunan pihak walinya.

Transaksi gadai yang dilakukan masyarakat Desa Jabi-Jabi Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam Aceh tidak sah karena *rahin* (orang yang menggadaikan) tidak memiliki hak terhadap harta yang digadaikan karena

harta atau barang yang dijadikan objek gadai merupakan harta orang lain dalam hal ini adalah harta anak yatim yang sedang dalam ampunan *rahn* (orang yang menggadaikan) maka dalam hal ini apabila ditinjau dari pendapat Imam Syafi'i maka hukumnya tidak sah karena ia tidak pemilik barang gadai dan harta tersebut digadaikanya bukan untuk keperluan sianak akan tetapi untuk keperluan atau kepentingan pribadi. Akan tetapi karena kurangnya ilmu pengetahuan masyarakat Desa Jabi-Jabi Kecamatan Sultan Daulat maka transaksi gadai yang tidak sesuai dengan pendapat Imam Syafi'i dan Syari'at Islam masih juga terjadi, maka dari itu, menurut penulis perlu dilakukan usaha-usaha penyuluhan hukum muamalah khususnya mengenai *rahn* (gadai) yang sesuai dengan pendapat Imam Syafi'i dan Syari'at Islam agar kedepannya masyarakat tidak melakukan kesalahan dalam melakukan transaksi khususnya dalam *rahn* (gadai).

Masyarakat Dasa Jabi-Jabi Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam Aceh melakukan transaksi gadai yang tidak memenuhi rukun dan syarat menurut pendapat Imam Syafi'i. Masyarakat di Desa tersebut tidak mengetahui bahwa harta atau barang yang menjadi objek gadai itu harus milik pribadi bukan milik

orang lain, dalam hal ini harta yang dijadikan objek gadai oleh *rahin* adalah milik anak yatim yang sedang dalam ampuannya untuk keperluan atau kepentingan pribadi maka hukumnya tidak sah. Sebagaimana menurut pendapat Imam Syafi'i mengenai rukun dan syarat *rahn* (gadai), akan tetapi masyarakat di Desa tersebut mengetahui rukun dan syarat *rahn* (gadai) setelah adanya penelitian yang dilakukan oleh penulis.

Dari paparan di atas menurut penulis, bahwa barang atau harta yang di gadaikan merupakan milik kita sendiri bukan milik orang lain apalagi harta anak yatim yang dijadikan objek gadai untuk keperluan atau kepentingan pribadi karena harta atau emas tersebut bukan milik kita walaupun harta tersebut sudah di amanahkan sama kita akan tetapi bukan berarti harta atau barang tersebut dapat kita gadaikan untuk keperluan atau kepentingan kita pribadi. Maka dari itu, penulis berkesimpulan bahwa transaksi gadai tersebut tidak memenuhi adanya konsep rukun dan syarat-syarat *rahn* (gadai) sesuai dengan pendapat Imam Syafi'i, dengan demikian penulis berkesimpulan transaksi gadai tersebut tidak sah.

Dengan demikian akhir dari kesimpulan penulis, dilihat dari segala aspek yang telah dipaparkan diatas baik dari tinjau dari landasan hukumnya, pendapat para ulama mengenai *rahn* (gadai) yang dijelaskan didalam kitab-kitab dari kalangan ulama tersebut dalam bab-bab sebelumnya, maka penulis berkesimpulan bahwa praktek menggadaikan emas atau harta anak yatim yang sedang dalam penggampuan oleh penggadai atau pihak wali tersebut pada dasarnya tidak memenuhi rukun dan syarat *rahn* (gadai) yang dijelaskan oleh imam Syafi'i dalam kitab *Al-Umm*.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dan analisis tentang hukum menggadaikan harta anak yatim sebagai jaminan utang oleh pihak wali di Desa Jabijabi Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Menggadaikan harta anak yatim untuk dijadikan sebagai jaminan utang wali tidak diperbolehkan (haram). Menurut pendapat Imam Syafi'i bahwa tidak boleh menggadaikan harta milik anak yatim untuk dijadikan jaminan hutang, terkecuali gadai tersebut merupakan atas nama kepentingan atau keperluan anak yatim.
2. Pada umumnya, pelaksanaan gadai dimasyarakat Desa Jabijabi Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam tidak sesuai dengan syarat sah gadai, kurangnya pengetahuan dan pemahaman menjadi salah satu masalah tentang pelaksanaan gadai, sehingga memberikan dampak yang kurang baik dalam prakteknya.

3. Adapun pelaksanaan gadai yang dilakukan oleh masyarakat Desa Jabi-jabi tidak memenuhi syarat gadai yang dikemukakan oleh Pendapat Imam Syafi'i, bahwa harta atau barang yang sah digadaikan merupakan harta hak milik penuh penggadai dan harta gadai itu tidak terkait dengan hak orang lain.

B. Saran-saran

Dari hasil penelitian ini, maka penulis menyarankan beberapa hal yang harus dibenahi :

1. Kepada kepala Desa ataupun pejabat yang terkait hendaknya lebih aktif dalam acara keagamaan seperti mengadakan kajian rutin tentang fiqh klasik dan fiqh modern ditengah masyarakat agar pemahaman masyarakatnya tentang hukum Islam selalu berkembang.
2. Khusus kepada tokoh agama, para ulama ustazd maupun dai agar lebih aktif memberikan arahan, menyampaikan hukum Islam yang berkembang khusus perkembangan fiqh Rahn (gadai) modern sehingga pemahaman masyarakat tentang Islam semakin kuat.

Karena dengan pendalaman agama insyaAllah akan semakin mudah dalam menjalankannya.

3. Kemudian kepada seluruh masyarakat agar menyadari betapa pentingnya mengetahui tentang pelaksanaan gadai, dari hasil pelaksanaan tersebut akan sangat membantu saudara kita yang kurang tahu.

Semoga penelitian ini dapat memberikan sumbangan wacana pemikiran dalam hukum Islam dan semoga bermanfaat bagi penulis dan semua pihak yang terlibat dalam menegakkan hukum Allah di bumi ini. Akhirnya kepada Allah penulis kembalikan segalanya. Mudah-mudahan penulisan ilmiah ini dapat mengundang ridha Allah Swt dalam mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali M. Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2003.
- Ali M. Hasan, *Masail Fiqhiyah Zakat, Pajar, Asuransi, Dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo persada, 2000).
- Mardani, *Hukum Perikatan Syari'ah Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003).
- Abu Abdullah Muhammad bin Idris, Asyi-Syafi'i, *Kitab Al-umm, jilid III* (Beurit: Dal Al- Kutub Al-Ilmiyah, t,th).
- A Mas'adi, Ghufuran *Fiqh Muamalah Kontektual* (Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2002).
- ar-Ramli, Syihabuddin *Nihayah al-Muthaj ila Syarh al-Minhaj*, (Riyat: Dar Alam al-Kutub, 1997).
- As'ad, Aliy *Terjemahan Kitab Fathul Mu'in*, jilid 2 (Yogyakarta: Menara Kudus 1979).
- asy-Syaukani, Muhammad *Nail al-Autar*, Jaz V (Beirut: Dar al-Fikr,t.th).
- Badan Statistik Desa Jabi-Jabi Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam-Aceh tahun 2018.
- Depertemen Agama RI, *Al- Qur'an Dan Terjemahannya*,(Surabaya: Dana Karya, 2004).
- Imam Nawawi, *Kitab al-mazmu' sarah mazahib, jilid 12*.
- Imam Syafi'i, *Ringkasan Kitab Al-umm jilid 2*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013).

Isma'il al-Kahlani, Muhammad Ibn *Subul as-Salam*, Juz III (Bandung: MaktabahDahlan, t.th).

Najieh, Abu Ahmad *Fiqh Mazhab Syafi'i*, cet. 1, (Bandung: Marja 2017).

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Jakarta: CV.Medya Duta, 2003).

Sunarto Achmad *Dkk, Terjemahan Shahih Bukhari*, (Semarang: Cv. Asy-Syifa', 1993).

Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016).

Sabiq, Sayyid *Fiqh as-Sunnah*, Jilid III (Beirut: Dar as- Saqafah al-Islamiyah, t.th).

Umar Sitanggal, Anshory *Fiqh Syafi'i Sistematis*, Jilid III (Semarang: CV. Asy syifa 1993).

Wardi Muslich, Ahmad *Fiqih Muamalah*, (Jakarta Timur: Amzah, 2010).